KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Batalkan Pengadaan Gorden, Tapi Anggarin 4,5 M Buat Cat dan Lift 55 M, DPR Insyafnya Setengah-setengah - DPR Dianggap Tidak Peka dengan Kesusahan Rakyat
Tanggal : Kamis, 19 Mei 2022
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 1-8

Batalkan Pengadaan Gorden, Tapi Anggarin 4,5 M Buat Cat Dan Lift 55 M

DPR Insyafnya Setengah-setengah



"Biaya satu bangunan aja Rp 4,5 miliar, rasanya Rp 76 triliun untuk biaya Pemilu nggak mahal-mahal amatlah."

@KPU_Garislucu

SETELAH menuai protes dan kritik, DPR akhirnya insyaf dan membatalkan proyek pengadaan gorden senilai Rp 43,5 miliar. Namun, jangan senang dulu, karena selain gorden, ternyata ada proyek lain yang juga tidak kalah fantastis. DPR menyiapkan anggaran Rp 4,5 miliar untuk cat dan Rp 55 miliar untuk perbaiki lift. Duh, DPR ternyata insyafnya masih setengah-setengah ya...

Pembatalan pengadaan gorden ini diputuskan oleh Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR, usai menggelar rapat dengan pimpinan dewan dan pihak Kesetjenan DPR. Kritikan keras

◆ BERSAMBUNG KE HAL 8

KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

DPR Dianggap Tidak Peka Dengan Kesusahan Rakyat

DPR Insyafnya

... DARI HALAMAN 1

dari berbagai pihak, baik di dunia nyata maupun dunia maya, jadi alasan utama membatalkan proyek tersebut.

"BURT memutuskan tidak melanjutkan pelaksanaan pengadaan gorden, vitrase, dan blind rumah jabatan DPR Kalibata," kata Ketua BURT Agung Budi Santoso, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Padahal tender gorden rumah dinas DPR ini sudah ada pemenangnya, yakni PT Bertiga Mitra Solusi. Mereka menawar dengan harga Rp43,5 miliar, tapi kini, proyek itu dibatalkan.

"Saya kira itu yang menjadi kesimpulan rapat setelah melalui diskusi panjang antara BURT dan kesekjenan," lanjutnya.

Setelah proyek dibatalkan, kini muncul lagi 2 proyek yang lagi-lagi bikin warga dunia maya geram. Yakni, proyek cat gedung kura-kura senilai Rp 4,5 miliar dan lift senilai Rp 55 miliar.

Dalam situs LPSE DPR, paket tersebut memiliki kode tender 735087 dengan nama tender 'Pengecatan Dome Gedung Nusantara DPR RI'. Prosesnya sudah memasuki tahap pengumuman pascakualifikasi.

"Tahun anggaran APBN 2022. Nilai pagu paket Rp 4.560.000.000 (Rp 4,56 miliar). Nilai HPS paket Rp 4.501.240.786 (Rp 4,50 miliar)," bunyi situs itu.

Sementara untuk lift DPR, bisa dilihat dari situs LPSE DPR, tender dengan kode 650087 itu, diberi nama 'Penggantian Lift Gedung Nusantara I DPR RI'. Tender dibuat pada November 2020 dan tuntas pada 8 Januari 2021 yang ditandai dengan penandatanganan kontrak.

Pemenangnya PT Angkasa Pura Solusi. Harga negosiasi untuk proyek ini tertulis Rp 54.342.800.000,50 (Rp 54,3 miliar) dari nilai pagu paket Rp 55.496.855.000 (Rp 55,4 miliar).

Terkait 2 proyek ini, Sekjen DPR, Indra Iskandar memberikan penjelasan. Pertama, dia menjelaskan soal proyek cat atap Gedung Nusantara atau dikenal dengan Gedung Kura-Kura. Kata Indra, proyek ini meliputi pengecatan atau *waterproofing* terhadap dome gedung perbaikan sejumlah komponen perlu dilakukan karena telah banyak yang rusak sejak terakhir diperbaiki tahun 2015. Perbaikan dan *waterproofing* dilakukan untuk mempersiapkan HUT RI bulan Agustus dan Kelompok Duapuluh atau G20.

"Kita melakukan kembali *waterproofing* untuk persiapan acara kenegaraan yang akan dilaksanakan pada 6 agustus itu nota APBN Pemerintah, Presiden. Kemudian tanggal 5-6 Oktober itu akan ada pertemuan G20 yang dihadiri 20 kepala parlemen dunia plus undangan 20 kepala parlemen dunia sekitar 40 ketua parlemen dunia pada 5-6 Oktober," kata Indra di Komplek Parlemen, Jakarta, kemarin.

Dia menyebut bahwa anggaran yang disediakan dalam perbaikan dan *waterproofing* ini sebesar Rp 4,560 miliar dengan luas dari atap tersebut sebesar 5.208 Meter. Teknis bahan yang digunakan diklaim ramah lingkungan dengan mengacu pada *green label*.

"Pada saat ini kami dalam tahap proses pemilihan penyedia melalui lelang umum yang bertanggal 17 Mei telah dilaksanakan penjelasan dokumen," jelasnya.

Sedangkan untuk proyek lift DPR, kata Indra, Indra pengerjaannya sudah selesai. Di tahun 2021, kata dia, ada bagian panel listrik yang waktu itu masih dalam pemeliharaan.

"Jadi karena masih ada lift yang masih diperbaiki, itu ada debu waktu itu yang menutupi *inverter-inventer* di lift. Sudah dibersihkan, kita pakai konsultan UI untuk mengaudit lift itu semua apa aja masalah kelistrikannya. Cuma P1 yang belum selesai. Karena sertifikatnya belum keluar dari disnaker," kata Indra.

Menurutnya, sudah tidak ada lift yang macet hanya inverter lift yang tertutup debu. Hal ini sudah dibersihkan. Soal pemenang tender, PT. Angkasa Pura Solusi, sudah sesuai. Perusahaan ini memang berkaitan dengan penyedia seperti elevator dan eskalator.

"Memang biasa kok Angkasa Pura Solusi. Mereka menyediakan untuk tangga berjalan, eskalator. Memang dia, semua di airport-airport memang dia yang mengerjakan kok, Angkasa Pura Solusi," kata dia.

Peneliti Formappi, Lucius Karus mengkritik DPR terkait proyek fantastis yang banyak menghabiskan uang rakyat. Misalnya soal pengecetan gedung DPR yang menghabiskan anggaran sampai Rp 4,5 miliar, kata dia merupakan bentuk pemborosan.

"DPR mestinya paling punya kepentingan dengan urusan pemanfaatan anggaran untuk hal yang lebih mendesak," ujarnya.

Lucius menegaskan, DPR harus peka dalam memanfaatkan anggaran negara. DPR diminta untuk memperhatikan kebutuhan masyarakat daripada kebutuhan sendiri. Jadi jangan karena ada alokasi anggaran, terus maunya dipakai semua, padahal ada kondisi lain terkait rakyat yang lebih memerlukan bantuan anggaran dari negara.

"Sebagai lembaga tinggi, sensitivitas itu penting karena DPR akan selalu jadi sorotan publik," tegasnya.

Di dunia maya, 2 proyek DPR itu kembali bikin warganet geram. "Hahahaha... lagi2 DPR.." kata *@AbduGaniJkt*. "GORDEN KEDUA! HAHAHAHA," cuit *@AgungConqueror*. "Suka suka kalian laa.. Kan kalian memang perwakilan rakyat untuk menguras dan menghabiskan uang negara.. Bukan perwakilan rakyat untuk mensejahterakan rakyat.." timpal *@AliThamora*. "kenapa si angkanya mesti milyaran teruuss?? gorden lah ngecat lah DARIMANA DUITNYA?!" tanya *@zepforte*.

"Biaya satu bangunan aja Rp 4,5 miliar, rasanya Rp 76 triliun untuk biaya Pemilu nggak mahal-mahal amatlah," ledek *@KPU_Garislucu*. "Cat atap gedung kura-kura MPR/DPR senilai 4,5 M akan dilelang tender. Jangan keliru lagi ya .. lelang tender yang dimenangkan itu yang penawarannya paling kecil bukan yg paling besar!" ledek *@tia_realname*. ■ SAR